



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME **PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

Dili, 9 Agustus 2005
Siaran Pers

Orang yang diduga melakukan Kejahatan Perang kembali ke Timor Leste

Seorang mantan anggota milisi yang telah didakwa oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (“PKKB”) baru-baru ini kembali ke Timor Leste dari Timor Barat. Kenyataan bahwa PKKB yang ditutup baru-baru ini menimbulkan sejumlah persoalan yang rumit, termasuk bagaimana caranya untuk menangani orang-orang yang telah didakwa dan yang kembali ke Timor Leste.

Pada atau sekitar tanggal 1 Agustus 2005 Manuel Maia melintasi perbatasan di Tunubibi dekat Maliana dan ditahan oleh para anggota masyarakat yang mengenalnya dan kemudian diserahkan kepada Polisi. Maia didakwa pada bulan Pebruari 2003 karena diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penyiksaan, yang dilakukan di Distrik Bobonaro pada bulan April tahun 1999. Dia didakwa bersama sekurang-kurangnya 30 orang lain dalam kasus yang dikenal sebagai kasus Cailaco, namun kasus ini tidak dilanjutkan di hadapan PKKB karena semua orang yang didakwa masih berada di Timor Barat.

SPSC dibentuk pada tahun 2001 sebagai pengadilan domestik di Dili yang mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum dan selama tahun 1999. PKKB melakukan persidangan terakhirnya pada bulan Mei 2005 dan pertanyaan belum terjawab mengenai apa yang harus dilakukan apabila salah satu dari begitu banyak terdakwa yang belum diadili memutuskan untuk kembali ke Timor Leste. Sebelum PKKB ditutup, banyak aktor penting yang terlibat dalam proses ini, termasuk para hakim PKKB, menyebutkan persoalan ini sebagai salah satu persoalan terbesar yang perlu diperhatikan dan merupakan alasan kuat untuk melanjutkan pekerjaannya. Walaupun PKKB mendakwa sebanyak 440 orang, sampai sekarang 339 orang tetap di luar yurisdiksi pengadilan-pengadilan Timor Leste.

Dilaporkan bahwa Kepala Polisi di Timor Leste, Paulo Martins, mengatakan bahwa Maia akan diinvestigasi dan dibawa ke hadapan pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Timor Leste. Walaupun demikian, persoalan tentang bagaimana dan dimana orang-orang yang didakwakan oleh PKKB harus diadili, menyangkut sejumlah persoalan hukum yang cukup rumit:

- Pada umumnya disetujui bahwa undang-undang yang berlaku pada saat ini mengatur bahwa terdakwa hanya dapat diadili oleh ‘panel khusus’ yang terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim nasional.
- Pada saat ini ada tiga hakim internasional yang bekerja di Pengadilan Distrik Dili, tetapi mereka menangani kejahatan biasa dan tidak jelas apakah mereka harus

ditunjuk secara khusus sebagai hakim PKKB agar mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus kejahatan berat.

- Walaupun beberapa hakim nasional telah ditunjuk untuk mengadili kasus, tetap tidak jelas apakah mereka mempunyai kualifikasi yang tepat untuk melakukan demikian, dengan mengingat bahwa semua hakim nasional gagal dalam ujian untuk memenuhi persyaratan.
- Kalaupun ada hakim-hakim untuk mengadili kasus Maia, tetap diragukan apakah ada pengacara yang berkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk menjamin penuntutan yang layak dan pembelaan yang adil, sesuai dengan standar-standar hukum internasional.

Bagaimanapun juga, ada sejumlah persoalan praktis yang sederhana tetapi fundamental yang akan menghalangi penuntutan pada masa depan terhadap orang-orang yang didakwa oleh PKKB. Semua bukti, berkas perkara dan arsip yang menyangkut orang-orang yang didakwa oleh PKKB telah disimpan di bawah kewenangan Jaksa Agung Timor Leste. Statusnya dan cara penyimpanannya tidak jelas, namun sebagaimana dikatakan baru-baru ini oleh seorang Jaksa kepada JSMP, pada prakteknya akan sulit menemukan dan mengakses berkas perkara yang menyangkut orang-orang yang diduga melakukan kejahatan berat. Jaksa tersebut juga menyebutkan bahwa walaupun Manuel Maia dapat diadili di Pengadilan Distrik karena mungkin melanggar undang-undang imigrasi, ada kebingungan tentang proses dan forum yang dapat digunakan untuk mengadilinya atas dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada dasarnya, dengan kembalinya Maia dari Timor Barat dapat dilihat bahwa penutupan PKKB secara prematur tanpa menciptakan lembaga penggantinya, ataupun kebijakan yang jelas, untuk menangani orang-orang yang didakwa oleh PKKB, merupakan keputusan yang tidak masuk akal. Ada kemungkinan besar bahwa para tersangka akan kembali dari Timor Barat dan kejadian ini seharusnya diperkirakan sebelumnya oleh PBB pada saat menyiapkan penutupan misinya di Timor Leste. Kegagalan PBB untuk merencanakan demikian samasekali tidak dapat diterima. Implikasinya untuk Timor Leste, dan wilayah ini pada umumnya, berpotensi untuk cukup berat dan seharusnya tidak dianggap remeh. Pada suatu pihak, kalau para tersangka tidak diadili secara tegas, atau tidak diadili samasekali, hal ini akan mengirim pesan yang salah kepada para tersangka yang berada di luar Timor Leste. Mereka dapat didorong untuk kembali ke desa-desa yang telah mencapai perdamaian yang rapuh, yang baru mulai pulih kembali dari trauma yang dialaminya pada tahun 1999. Pada pihak yang lain, stabilitas sosial dan politik yang dapat diperoleh apabila para tersangka diadili, seharusnya tidak dicapai melalui persidangan yang hanya merupakan pertunjukan, di hadapan pengadilan yang tidak dibentuk dengan baik, atau apabila mengorbankan hak-hak tersangka.

Keperluan untuk tetap menuntut kejahatan berat adalah rekomendasi jelas yang disebutkan dalam laporan yang baru diterbitkan oleh Komisi Ahli yang ditunjuk oleh PBB. Komisi Ahli tersebut ditugaskan untuk mengevaluasi sejauh mana pengadilan-pengadilan di Indonesia dan Timor Leste berhasil menuntut secara layak para pelaku pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999. Komisi tersebut merekomendasikan agar investigasi dan penuntutan dilanjutkan di Timor Leste dengan bantuan internasional, dan agar para tersangka di Indonesia diadili kembali sesuai dengan standar penuntutan internasional. Kalau opsi-opsi ini tidak

diterapkan, Komisi tersebut merekomendasi agar pengadilan internasional dibentuk untuk mengadili para tersangka dan menjamin keadilan untuk Timor Leste. Apabila mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi tersebut, Dewan Keamanan harus mengakui dan menganggap penting implikasi dari kegagalan untuk menerapkan mekanisme spesifik untuk menangani para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang kembali ke Timor Leste. Setidak-tidaknya, Dewan Keamanan harus mendukung pemerintah Timor Leste untuk membentuk panel hakim yang khusus, sesuai dengan undang-undang nasional untuk secepat mungkin mengadili orang-orang yang telah didakwa yang kembali ke Timor Leste.